



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Dekot & Wakil Walikota Jakpus Canangkan Gerakan Kerja Bakti

NONSTOP, CANANGKAN- Wakil Walikota Jakarta Pusat, Arifin mencanangkan "Gerakan Kerja Bakti Hebat". Menggandeng Dewan Kota (Dekot) Jakarta Pusat, Arifin mengajak warganya untuk giat melakukan kerja bakti.

Dewan Kota Jakarta Pusat, Ardy Purnawan Sani berkata, "Gerakan Kerja Bakti Hebat" ini dicanangkan bersama Wakil Walikota Jakpus, Arifin. "Oleh Wakil Walikota Jakpus, Pak Arifin, pencanangannya dilakukan di RW 07, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Minggu lalu, (17/05)," ujar Ardy, kepada *Nonstop*, kemarin, di Jakpus.

"Gerakan Kerja Bakti Hebat" ini, ucapnya, merupakan buah pemikiran Dekot dan Wakil Walikota Jakpus. Bersama LMK, Karang Taruna dan seluruh warga RW 07 Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, mereka membenahi kondisi lingkungan, seperti perbaikan jalan, saluran dan WC umum. "Hebatnya, kegiatan ini dilaksanakan secara swadaya masyarakat," cetusnya.

Wakil Walikota Jakpus, Ari-



Wakil Walikota Jakpus, Arifin mencanangkan "Gerakan Kerja Bakti Hebat"

fin memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan ini. Ia berharap, kegiatan itu dapat dilaksanakan rutin di lokasi lain. "Kerja Bakti Hebat ini adalah wujud dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Yaitu nilai gotong-royong, kerjasama dan saling bahu-membahu untuk kepentingan bersama. Untuk itu, kegiatan positif ini harus bisa ditularkan ke wilayah lainnya," tandasnya.

Ditambahkan Ardy, orang-orang hebat itu adalah mereka yang masih peduli dengan lingkungannya. "Dan, hanya orang-orang hebat yang masih

mau turun tangan memperbaiki lingkungan. Merekalah sesungguhnya orang-orang hebat itu" tukas Ardy.

Kegiatan "Kerja Bakti Hebat" itu berlangsung tiga hari (16 Mei s.d. 18 Mei 2015). Diawali dengan perbaikan jalan lingkungan dan rencananya akan dilanjutkan dengan perbaikan saluran dan WC umum warga. Hadir juga Kasatpol PP Jakpus (Yadi), lalu Camat Tanah Abang (Hidayatullah), Lurah Bendungan Hilir (Suprayogi) serta SKPD terkait seperti Sudin Kebersihan dan PU Air.(AGS)



GUNTINGAN BERITA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
Halaman	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Pedagang Ogah Revitalisasi Gedung Blok VI Digarap Swasta

PD Pasar Jaya Dicurigai Ada Main di Pasar Senen

Rencana revitalisasi gedung Blok VI, Pasar Senen, Jakarta Pusat membuat cemas pedagang di sana. Muncul dugaan, PD Pasar Jaya ada main dengan pihak-pihak swasta yang ngotot menggarap revitalisasi gedung pasar tertua tersebut.



di diwarnai di Pasar Senen, Kamis (21/5).

Dia mengemukakan, bila revitalisasi dilakukan PD Pasar Jaya dengan melibatkan pihak swasta, maka harga kios semakin mahal. Harga Rp 60 juta per meter dianggap mencekik para pedagang.

PARA pedagang mengaku sangat mendukung rencana revitalisasi yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya. Namun, revitalisasi harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab bila dengan menggunakan kecek pihak swasta maka para pedagang akan dibebani dengan harga selangit untuk membeli harga kios tersebut.

"Kalau revitalisasi dengan menggunakan dana pihak swasta maka yang dibebani adalah pedagang, karenanya Pemda DKI harus berpikir kepada pedagang. Makanya aneh kalau PD Pasar Jaya ngotot (buatan swasta mendesai revitalisasi)," kata salah seorang pedagang yang tekam di sebutkan namanya sa-

di diwarnai di Pasar Senen, Kamis (21/5).
 Dia mengemukakan, bila revitalisasi dilakukan PD Pasar Jaya dengan melibatkan pihak swasta, maka harga kios semakin mahal. Harga Rp 60 juta per meter dianggap mencekik para pedagang.

"Siapa yang sanggup beli kios per meter Rp 60 juta, kalau lima meter saja sudah Rp 300 juta, belum lagi cebel-embelnya maka bisa mencapai Rp 500 juta," ungkapnya.
 Menurutnya, Pasar Senen Blok VI memiliki sejarahnya sendiri. Awalnya adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di wilayah Kenari. Akhirnya, pada masa Gubernur DKI Jakarta Cokro Pradono dilantikasi di Pasar Senen Blok VI.

Dia mengisahkan, hasil dagangan yang dijualkan di Pasar Senen, Blok VI memiliki ke khasan dalam merajakan dagangannya, seperti ulos (Pakaian tenun asal Sumatera Utara), songket, Ran asin, teri medan, dan rempah-rempah.

"Jadi seharusnya Blok VI ini harus dilestarikan seperti Pa-



Pasar Senen Jakarta Pusat.

sar Klewer, di Solo. Jangan sampai bila revitalisasi dikelola pihak swasta, maka para pedagang lama bengong, dan diambil pedagang baru yang memiliki uang," tuturnya.

Jal senad dikatakan, Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Senen, Tambun Tambunan. Dia sangat merespon penyataan Gubernur DKI Jakarta yang akan merevitalisasi Pasar Senen, Blok VI ini dengan menggunakan APBD sebesar Rp 400 miliar.

"Kami sudah kirim surat kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta agar mendukung upaya Gubernur DKI (Basuki Tjahja Purnawan) merevitalisasi Blok VI ini," terang Tambun.

Menurut Tambun, sumi ini sudah dilayangkan beberapa

lari lalu, namun belum ada kepastian kapan para pedagang Blok VI diterima anggota DPRD.

Dia menegaskan, harga kios yang rencananya ditawarkan kepada para pedagang Rp 60 juta per meter sangat mambatkan para pedagang Blok IV nantinya.

Menurutnya, bila harga sebesar itu dibebani kepada para pedagang Blok VI maka tidak mampu untuk membeli, dan terpaksa akan berpindah dari Blok VI ini. "Hanya orang-orang tertentu yang akan mampu berdagang di Blok VI," tambahnya.

"Pada dasarnya semua pedagang senjo untuk dibangun, tapi harus jelas dan transparan, jangan main patok harga yang mencekik para pedagang," tegas Tambun.

Sed diwarnai, Anggota Komisi B DPRD Faskes PDIP So-

reda Tambunan menambahkan, adanya beberapa pedagang Blok VI mengkhawatirkan dirinya. Namun, para anggota dewan pada saat itu masih roses.

"Mungkin minggu depan kami akan menerima pedagang tersebut, dan memampung aspirasi mereka. Kami akan undang juga teman-teman wartawan untuk mengetahui perkembangan Pasar Senen Blok VI tersebut," ujar Sereida.

Namun, dia enggan berkomitmen terlalu detail mengenai Blok VI, sebelum mendengar aspirasi para pedagang tersebut. Meski demikian, Sereida, yang juga Ketua DPD GAMKI Jakarta periode 2015-2019 ini menegaskan, akan mengawal aspirasi pedagang Blok VI, jangan sampai oknum PD Pasar Jaya merugikan para pedagang Blok VI (RAM/BCR)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	
Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			

Ketua RT/RW Pusing Dengan Instruksi Ahok

NONSTOP, INSTRUKSI- Instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada RT/RW untuk membeli telepon seluler atau Smart phone berbasis Android mengundang pertanyaan dari sejumlah kalangan. Bahkan beberapa pengurus RT/RW mengaku pusing dengan instruksi orang nomor satu di DKI Jakarta itu.

Ketua RT 02/06 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Evi Rusmilati terkejut mendapat surat dari Lurah Kramat, Suparjo No. 230/071.-34, tanggal 13 Mei 2015. Pasalnya, surat blanko kelurahan Kramat bersifat segera, dan himbauan itu meminta agar sebanyak 96 RT dan 8 RW di Kelurahan Kramat untuk membeli HP Android.

"Ya kalau saya diminta untuk membeli HP Android gak mampu, dan lagian saya gak bisa main HP secara canggih

seperti itu," kata Evi, Kemarin.

Dalam surat Lurah Kramat, Suparjo yang diterima 96 RT dan 8 RW itu berbunyi, "menindak lanjuti SMS Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang mengintruksikan kepada RT dan RW untuk segera berpartisipasi dan menggunakan layanan Smart City dengan cara mendownload aplikasi QLUE dari Playstore pada Handpone/ Smartphone berbasis Android, berkaitan dengan hal tersebut di atas saya mohon dengan hormat kepada saudara RW dan RT se Kelurahan Kramat agar melaksanakan intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta"

Namun, intruksi Gubernur DKI yang disampaikan kepada Lurah Kramat, membuat diri Ketua RT 02/06 itu hanya bisa pasrah. "Saya hanya bisa pasrah aja, apalagi ini sangat membebani saya," keluhny.

Saat dihubungi *Nonstop*, Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede membenarkan adanya intruksi Gubernur DKI kepada RT/RW di wilayah Jakarta Pusat untuk membeli HP Android. Mangara mengklaim hal itu untuk menunjang pelayanan di wilayahnya, dan Pemda DKI Jakarta mengetahui perkembangan situasi di wilayahnya.

"Diharapkan membeli Android, kalau ada hal-hal penting masuk Smart City, dan Pemprov DKI dapat mengetahui apa yang terjadi terhadap warga," tutur Mangara.

Karenanya, lanjut Mangara, RT dan RW di Jakarta Pusat dianjurkan memiliki HP Android untuk menunjang program Smart City tersebut. "Jadi gubernur mengetahui keluhan warga. Ya, kita gak memaksa RT/RW harus membeli, tapi dianjurkan," ujar Mangara. (RAM)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
--------------	---	---	---	---

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, **30** **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Terapkan Sistem Kontrol Terpadu

GAMBIR - Kecamatan Gambir adalah jantung ibu kota, bahkan negara. Seluruh aktivitas bisnis dan pemerintahan terpusat di wilayah seluas 760 hektare itu. Kelurahan Gambir sebagai bagian di dalamnya pun berperan penting untuk menjaga keamanan, kebersihan, hingga ketertiban.

Keberadaan *smart city* diakui Lurah Gambir Ahmad Salam sangat membantu dalam menjalankan sistem kontrol terpadu di wilayahnya. Yakni, menjembatani antara lurah dan RW-RT. "Besok (hari ini, Red) saya mengumpulkan ketua RW dan RT untuk lebih mematangkan koordinasi," jelasnya.

Menurut Salam, ketua RW dan RT di wilayahnya dituntut lebih peka dan responsif terhadap keluhan warga di *smart city*. Mengingat, hampir seluruh warga yang berdomisili atau beraktivitas di Kelurahan Gambir adalah pengguna aktif media sosial.

Dalam *ranking* kelurahan *smart city* kemarin, Gambir dipaksa *out* dari sepuluh besar. Mereka turun satu setrip ke urutan 11 atau posisinya digantikan Kelurahan Kramat Pela. Padahal, sejatinya tidak ada satu pun keluhan dari Gambir yang tidak ditindaklanjuti. Di antara 19 keluhan, 10 tuntas dan 9 lainnya sedang diproses. **(bad/col/dns)**

SMART CITY

Dua Datang, Dua Keluar

Sepuluh Besar Kelurahan Smart City*

Naik: ↑ Turun: ↓ Tetap: ⇅

Kelurahan	Poin**	Keluhan Tuntas
1. Semper Barat (Jakut)	328 ↑	109 (87,2 persen)
2. Pasar Baru (Jakpus)	114 ↑	38 (80,85 persen)
3. Bangka (Jaksel)	85 ↑	27 (77,1 persen)
4. Pinangsia (Jakbar)	74 ↑	32 (47 persen)
5. Pulo (Jaksel)	72 ↑	27 (96,4 persen)
6. Tanjung Duren Utara (Jakbar)	64 ↑	19 (59 persen)
7. Gunung Sahari Utara (Jakpus)	60 ↑	19 (65,5 persen)
8. (14) Petojo Utara (Jakpus)	42 ↑	16 (55,2 persen)
9. (8) Cipulir (Jaksel)	41 ↓	12 (54,5 persen)
10. (15) Kramat Pela (Jaksel)	40 ↑	13 (92,8 persen)

Keterangan : *) Berdasarkan aplikasi *Qlue* pada 21 Mei 2015.
 **) Naik turun poin dihitung per pekan.
Catatan : Angka dalam kurung adalah peringkat sebelumnya.



GUNTINGAN BERITA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Lalui Akses Monas, Pengunjung Ramai

GAMBIR - Jika tidak ada aral, pusat kuliner Lenggang Jakarta diresmikan hari ini (22/5). *Jelang launching*, pusat kuliner yang dihuni 339 kios itu ramai pengunjung. Apalagi kini akses ke Monas dilewatkan Lenggang Jakarta alias menutup pintu Taman Rusa.

Sebagian pedagang pun menyatakan senang menempati lokasi seluas 200 meter persegi tersebut. Sejak menempati kios pada Rabu (20/5), dagangan mereka laris manis. "Sebelum pintu (Taman Rusa) ditutup, saya makan dagangan sendiri," ujar Rosel, 35, pedagang sate padang.

"Kalau hari ini (kemarin, Red), dagangan saya sudah habis pukul 13.00. Padahal, sudah dua kali saya *nambah*," sambung Rosel. Konsep Lenggang Jakarta sebagai *pilot project* penataan PKL (pedagang kaki lima) modern itu juga membuat Rosel bersemangat. Setiap pagi, misalnya. Sebelum membuka kios, dia dan pedagang lainnya didata menggunakan *finger print*.

Apresiasi juga diberikan pengunjung Lenggang Jakarta. Kini, mereka memiliki tempat khusus untuk menikmati kuliner sekaligus kungko di area Monas. Selain itu, dilengkapi fasilitas seperti musala dan toilet. "Bisa jadi pilihan saat jam makan siang," imbak Niro Aditya, 26, pengunjung Lenggang Jakarta.

Harga yang ditawarkan di Lenggang Jakarta pun tidak terlalu mahal. Contohnya, seporci sate padang (nasi plus 6 tusuk sate) dibanderol Rp 25 ribu. "Dari harga *segitu*, saya dapat Rp 17 ribu, sedangkan pengelola dapat Rp 7 ribu," jelas Rosel. (bad/co1/dns)



SENANG: Mita, pedagang pakaian di Lenggang Jakarta, saat menata dagangannya. Pusat kuliner di kawasan Monas itu akan diresmikan hari ini (22/5).



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	
Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			

DKI Optimistis Lenggang Jakarta Ramai Pengunjung

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta optimistis pusat kuliner Lenggang Jakarta yang terletak di kawasan wisata Monas akan ramai pengunjung. Area wisata kuliner itu dilengkapi dengan pertunjukan hiburan.

"Kalau tempatnya rapi, bersih, dan tertata dengan baik pasti akan ramai pengunjung. Apalagi, kalau ada hiburannya juga, bisa lebih ramai lagi," kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta

Pusat, Kamis (21/5).

Berbagai pertunjukan hiburan akan disajikan kepada para pengunjung di Lenggang Jakarta. Pertunjukan seni di sana, antara lain, musik, gambang kromong, *live music*, dan lain sebagainya.

Sementara itu, terkait harga makanan dan minuman yang ditawarkan di kawasan kuliner tersebut, mantan wali kota Bliitar itu menilai, relatif murah dan terjangkau. Kalau memang rasanya enak, pasti akan laku

terus dan dicari orang-orang.

Rencananya, Lenggang Jakarta akan diresmikan pada Jumat (22/5). Setelah diresmikan, pusat kuliner tersebut akan beroperasi mulai pukul 06.00 hingga 23.00 WIB pada Senin hingga Jumat. Akan tetapi, khusus setiap akhir pekan tempat itu dapat beroperasi selama 24 jam, yakni mulai Sabtu sore hingga Ahad pagi. Untuk harga kuliner bervariasi, mulai dari Rp 15 ribu hingga Rp 40 ribu per porsi. ■ antara ed: erdy nasrul



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	
Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			

Pemerintah Bangun 60 Taman Anak Tahun Ini

JAKARTA — Pemerintah Jakarta akan menambah 54 ruang publik terpadu ramah anak taman anak hingga akhir tahun ini. Ruang publik ini akan didesain khusus untuk taman bermain anak-anak dan tempat diskusi warga Jakarta.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan rencana tersebut saat meresmikan Taman Bahari di Kelurahan Gandaria Selatan di Cilandak, Jakarta Selatan, kemarin. "Anak-anak yang kreatif itu biasanya anak-anak yang bermain di luar ruangan," ujarnya.

Menurut Basuki, anak-anak di perkotaan seperti Jakarta kian tertutup dan bersifat individual karena kekurangan lahan bermain. Anak-anak dari perdesaan, kata dia, cenderung atraktif karena sejak kecil punya banyak aktivitas di luar rumah.

Karena itu, solusi yang ditawarkan pemerintah Jakarta adalah membangun ruang-ruang terbuka sebagai taman bermain. Selain untuk anak-anak, para orang tua bisa memanfaatkannya untuk saling bertukar

informasi soal lingkungan sembari mengasuh. Menurut dia, banyaknya kejadian anak gizi buruk akibat kurangnya interaksi antar-penduduk di perumahan.

Ruang-ruang publik tersebut akan dibangun pada lahan-lahan milik pemerintah yang telantar. Lahan yang tak terurus seluas 1.500-4.000 meter persegi di tiap lokasi akan diubah menjadi taman bermain, lapangan futsal, aula, ruang pendidikan anak usia dini, serta kebun tanaman obat.

Saat ini baru enam ruang publik yang selesai dibangun. Taman-taman itu terletak di Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara; Gandaria Selatan, Jakarta Selatan; Cideng, Jakarta Pusat; Cililitan, Jakarta Timur; Kembangan, Jakarta Barat; dan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. "Tahun depan jumlahnya tiga kali tahun ini," kata Basuki.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Nandar Sunandar menambahkan, tahun ini luas total ruang terbuka ditargetkan 50 hektare. Saat ini baru tercapai 11 persen. Selain lahan telantar milik negara, pemerintah akan membeli lahan milik perseorangan untuk dijadikan taman.

Sudah ada 159 titik lahan telantar yang akan dibeli pemerintah untuk diubah menjadi taman. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1,8 triliun. Lokasinya sebagian besar di Jakarta Timur. "Penambahan taman ini sekaligus mengejar target ruang hijau 30 persen tahun ini," ucapnya.



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

PELARANGAN SEPEDA MOTOR

Menata Kesemrawutan dengan Tetap, Memerhatikan Keadilan Masyarakat

Jelang enam bulan pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 195 Tahun 2014 dan kemudian direvisi dengan Pergub 141 Tahun 2015 tentang Pelarangan Sepeda Motor di Jalan Protokol dari Bunderan Hotel Indonesia-Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat masih menyisakan pro dan kontra di masyarakat.

Pelarangan kendaraan roda dua melintas di jalan utama itu awalnya berlaku 24 jam per hari nonstop dalam seminggu. Tetapi mulai 6 April 2015, Gubernur DKI Basuki Tjahjaja Purnama alias Ahok memperbolehkan ruas jalan itu dilalui sepeda motor mulai pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Hal itu sempat dikritisi oleh banyak kalangan sebagai kebijakan setengah hati.

Selama uji coba (sejak 17 Desember 2014), polisi sudah menyiapkan sanksi tegoran simpatis hingga tilang bagi pengendara yang nekat melintas. Sejak diberlakukan kebijakan itu, Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat terlihat relatif tertib, lancar, aman, dan nyaman. Tidak ada lagi kendaraan roda dua yang bersliweran di ruas jalan ini.

Kondisi itu yang diinginkan Gubernur Ahok, Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat bebas sepeda motor, sama seperti jalan utama di kota-kota besar di negara-negara maju. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, pusat kegiatan kenegaraan, pusat pemerintahan, memang harus punya wilayah (jalase) yang dapat membanggakan di mata masyarakat internasional.

Namun sebelum diperlakukan uji coba itu, Ahok pernah menyampaikan alasan antara lain, pelarangan sepeda motor itu untuk me-

nata kesemrawutan lalu lintas di jantung kota. Pasalnya, selama ini banyak pengendara motor yang menyembot trotoar dan lampi merah, mengurangi angka kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, dan lain-lain.

Alasan itu mengandung perdebatan dari masyarakat pengendara. Sebab, menurut *Traffic Management Center* (TMC) Polda Metro Jaya, bahwa motor bukan penyebab kemacetan jalan, dan tingkat kecelakaan tertinggi di Jakarta bukan terletak di Jakarta Pusat, sebagai wilayah diberlakukannya kebijakan itu.

Bahkan Indonesia Traffic Watch (ITW) melakukan gugatan *class action* ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Pergub No 195 tahun 2014 dan Pergub No 141 tahun 2015, karena banyak sekali masyarakat kecil mulai dari karyawan, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, pengantar barang atau *delivery order*, pengantar surat, tukang ojek, dan lain-lain dirugikan akibat peraturan ini.

Kerugian nyata tak terhitung nilainya yang diderita masyarakat akibat jalan-jalan alternatif menuju dan dari wilayah Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat antara lain Jalan Abdul Muis, Jalan Kebon Sirih, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Budi Kemuliaan, dan Jalan Tanah Abang I-III setiap hari macet parah. Bus tingkat gratis yang dijanjikan sebagai kompensasi, siap melintas setiap 10 hingga 15 menit, ternyata belum bisa dipergunakan oleh para pengendara motor. Pemprov DKI juga belum bisa menambah kapasitas lahan parkir untuk menampung kendaraan roda dua.

Fakta ini yang hendaknya menjadi pertimbangan krusial bagi Gubernur Ahok dan Pemerintah Provinsi (Pem-

prov) DKI Jakarta untuk tidak memberlakukan larangan pengendara sepeda motor melintas di jalan protokol lainnya seperti Jalan Sudirman, Jalan Gator Subroto, Jalan HR Rasuna Said, dan Jalan MT Haryono dalam waktu tidak terlalu lama ini.

Guna mewujudkan "Jakarta Baru, Jakarta Smart City", Pemprov DKI berenang menata, mengatur, menertibkan lalu lintas. Tetapi hendaknya mempertimbangkan banyak aspek, sehingga dapat diminimalisasi kerugian yang dialami masyarakat kecil. Mereka pembayar pajak yang setia, berkontribusi besar dalam pemertanian pelapangan asli daerah (PAD). Apa lagi selor kendaraan bermotor-sah masih menjadi andalan dalam meraih PAD DKI. Jadi Gubernur Ahok dalam menata kesemrawutan lalu lintas harus memperhatikan keadilan masyarakat.

Pertumbuhan kendaraan yang mencapai 13 persen per tahun, jumlah sepeda motor di Jakarta mencapai 13.084 - 372 unit, sebanyak 4.000-4500 unit motor per hari mengajukan izin pembuatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) baru (data TMC-Desember 2014) tidak sebanding dengan ketersediaan panjang jalan di Jakarta.

Pembatasan operasional kendaraan yang dicanangkan Pemprov DKI guna mewujudkan Jakarta yang nyaman, tertib, aman, lalu lintasnya lancar tertata dengan baik, wajib didukung oleh semua pihak. Namun alangkah bijaksananya jika diabaikan dulu, lahan parkir yang memadai di pinggiran kota (perbatasan) dan tengah kota, percepat pelaksanaan armada Transjakarta bus kota terintegrasi busway (BKTB)-bus sedang sebagai feeder (pengumpan) sampai mencapai kebutuhan yang

ideal agar busway (kedutaan bus) dapat dipastikan waktunya.

Pengguna bus Transjakarta tidak ingin berlama-lama di dalam halte menunggu tibanya kendaraan. Tingkat koordinasi dengan polisi, TNI, dan pihak-pihak lain yang dapat membantu program sterilisasi koridor bus Transjakarta.

Selanjutnya, lakukan segera revitalisasi angkutan umum (bus kota besar, bus sedang, bus kecil, mikrolet, metromini, kopaja dan lain-lain) di Ibu Kota yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga masyarakat pengguna kendaraan pribadi sika rela berhalal ke angkutan umum.

Jika hal itu tidak segera dilakukan, jangan berharap masyarakat mau berhalal, dan ancaman Jakarta lumpuh total yang diprediksi banyak kalangan bisa terjadi. (Yon Parjiyono)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Hindari Narkoba dan Imigran Gelap Penghuni Apartemen Didata

JAKARTA (Pos Kota) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan menggelar pendataan terhadap warga penghuni rumah susun sederhana milik (rusunami) atau apartemen subsidi di ibukota. Pendataan dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang penghuni unit di apartemen tersebut.

"Kita siap masuk untuk mendata para penghuni apartemen bersubsidi. Memang, akan ada risiko pelanggaran, tapi kami punya kewenangan yang diatur dalam UU," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Kamis (21/5).

Ia mengatakan, pendataan bukan untuk mengganggu ruang pribadi peng-

huni apartemen. Namun, untuk menghindari masuknya kasus narkoba, imigran gelap, prostitusi atau masalah lainnya ke dalam apartemen.

"Ya, penghuni apartemen menolak didata dengan alasan mengganggu privacy. Ya, kami hargai dan hormati. Itu kalau di rumah masing-masing. Tapi ketika masuk mendata siapa yang ada di unit itu. Itu tanggung jawab aparat bukan privacy," ujarnya.

HARUS PATUH

Edison menegaskan, pemilik apartemen atau rusun bersubsidi ini harus bertanggung jawab kepada penghuni di setiap unit. Karena itu, penghuni apartemen juga harus mematuhi aturan yang berlaku.

"Pendataan dan pembentukan RT/RW akan dilaksanakan bekerja sama dengan dinas terkait di antaranya Dinas Perumahan, Satpol PP dan aparat keamanan," tegasnya.

Sekadar diketahui Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera mendata terhadap penghuni apartemen atau rusunami.

Instruksi tersebut dikeluarkan Djarot setelah ditemukannya praktik prostitusi online di kawasan Rusunami Kalibata City oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Jumat (24/4) malam lalu. Pendataandilakukan merata kepada seluruh penghuni apartemen atau rusunami. (john/st)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Jumat** Tanggal : **22** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, **5**, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Kantornya Mau Dipugar, Bareskrim Pindah Ke Jati Baru

Gedung Dinas PU Masih Dipakai, P2B Kosong

Bekas gedung Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang terletak di Jati Baru, Jakarta Pusat tampak ramai. Belasan kendaraan roda empat terparkir di halaman depan. Sementara di sebelah kiri gedung, puluhan sepeda motor berjajar rapat, memanjang sampai ke belakang.

BEBERAPA pria bersenang melihat PNS yang berkantoran di sini terlihat wongkrong di jakaran motor ini. Mereka ayuk ngobrol sambil menyeruput kopi. Tak jauh dari mereka, belasan PNS tampak biliar modik kelum-masuk gedung. Beberapa dari mereka terlihat mengopi berkas. Di pingir masuk gedung, dua orang petugas keamanan berjaga di lanta dan kiri pingir.

"Kami memang masih kerja seperti biasa. Belum ada persiapan pengosongan atau pindah gedung. Tidak ada instruksi untuk itu," ujar Raihan, staf di bagian hama di gedung lama Dinas PU.

Dia mengungkapkan, para pegawai PU akan dipindahkan ke kantor baru. Gedungnya di belakang. Namun pembangunan gedung baru itu belum selesai. Saat ini gedung baru belasan lantai itu masih dalam tahap penyelesaian akhir.

"Sepertinya sudah hampir selesai. Mungkin akhir tahun selesai, dan baru bisa pindah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisar Jenderal Budi Waseso mendampingi Kepala Kota DKI Jakarta untuk rencana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Abah). Kedatangan jenderal bintang tiga ini, salah satunya untuk memimpin gedung.

Pasalnya, gedung Bareskrim di kompleks Mabes Polri akan dipugar.

Budi membeberkas, gedung Bareskrim sudah tidak mampu menampung personel kurus berlabang busur dan anak panah tijan itu.

"Gedung (Bareskrim) ini sudah terlalu lama dan tidak layak pakai dengan kondisi sekarang dan juga jumlah personel kita. Untuk kapasitas dengan jumlah personel sudah melebihi tiga kali lipat, jadi mesti kita besarkan," terangnya.

Ahok bersedia meminjamkan salah satu gedung milik Pemprov DKI untuk dipakai personel Bareskrim selama proses pemugaran. "Pakai gedung bekas PU di Jati Baru," katanya.

Gedung itu bisa segera digunakan personel Bareskrim. "Mereka segera saja masuk. Kosong kok gedungnya," tegar bekas anggota Komisi II DPR ini.

Namun gedung lama Dinas PU ternyata masih dipakai. Menurut Raihan, sepelelahkannya gedung yang akan dipindahkan ke Bareskrim bukan gedung lama Dinas PU. Melainkan, gedung bekas Dinas Perencanaan dan Penganggaran Bangunan (P2B).

Kondisi gedung ini saat ini memang kosong. Pengosongan dilakukan secara bertahap. Dinas P2B dilewati ke dalam Dinas



Gedung lama Dinas PU DKI di Jati Baru masih sepi.

Perrataan Kota. "Saya belum tahu kalau gedung baru (di belakang) sudah jadi, mau dipakai gedung ini. Kalau gedung P2B memang kosong," kata Raihan.

Pengamatan Rakyat Merdeka gedung bekas Dinas P2B di belakang gedung lama Dinas PU memang sepi. Tak terlihat ada pegawai beraktivitas. Gedung itu dijaga dua petugas keamanan berpakaian serba hitam. Mereka berjaga di meja lobby.

Menunggu ke dalam, ruangan di lantai ini gelap dan sepi. Di dalam ruangan-muang di sebe-

lah kiri sudah kosong. Penjaga di meja lobby itu menyangkapkan, gedung ini dikosongkan pada Desember lalu. Bersamaan, para pegawai eks Dinas P2B pindah kantor ke tempat kerja baru.

"Meski sekarang di gedung Dinas Tata Ruang yang terletak di jalan Abdi Murni, Tanah Abang, Jakarta Pusat," terangnya.

Meski gedung eks Dinas P2B tak lagi ditempati, beberapa kendaraan dinas instansi ini masih diparkir di halamannya. Terlihat ada dua mobil bak terbuka berspreker empuk roda dan sebuah jeep. Dua mesin

keruk (backhoe) juga parkir di halaman sebelah kanan. Di seberangnya ada dua kendaraan angkut alat berat.

Beberapa pegawai bersenang tak menjaga kendaraan dinas ini. Salah satu pegawai itu menggratiskan kendaraan dinas ini milik Bagian Perencanaan Dinas Penataan Kota. Ia belum tahu kapan gedung ini akan dipakai Bareskrim.

"Sampe sekarang belum ada instruksi untuk memindahkan kendaraan. Saya diperintah menjaga kendaraan seperti biasa," katanya. ■ WDA